

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Andasasmita, Komar, 2011, *Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hadjon, Philipus M., 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta.

Henricus dan Mulyoto, 2012, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk, dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hilman, Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Khairandi, Ridwan, 2017, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta

M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta

Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Mertokusumo Sudikno, 2003. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty. Jogjakarta

_____, 2016, *Mengenal Hukum*. Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Mulyoto, Henricus, 2012, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk, dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwosutjipto, H.M.N., 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 2008.

- Prasetya, Rudhi, 2002, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2009, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Rahardjo, Handri, 2013, *Hukum Perusahaan (Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII - Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2016, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Subekti, R, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sulistiyandari, 2012, *Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia)*, Sidoarjo ,Laras
- Sumardjonno, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. *Metode Penelitian Ilmiah*, Angkasa, Bandung, 2001
- Sumiarti, Endang, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta
- Widjaya, I.G. Rai, 2011, *Hukum Perusahaan*, Kasainc Blanc, Bekasi.

Internet:

Hukumonline, *Apakah Utang Isteri juga Merupakan Utang Suami?*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5090fb04045b4/apakah-utang-isteri-juga-merupakan-utang-suami/>.

Rini, Mike, *Perlukah Perjanjian Pranikah*, dikutip dari [http://www.perencanakeuangan.com/files/Perlukah Perjanjian Pranikah.html](http://www.perencanakeuangan.com/files/Perlukah%20Perjanjian%20Pranikah.html).

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1947 Nomor 23).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Burgerlijk Wetboek*).

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).